

**ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN
PADA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh:

M. NUR IKHWAN
NIM. 50424010

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

**ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN PADA
PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ekonomi Syariah (M.E)



Oleh:

M. NUR IKHWAN

NIM. 50424010

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



M. Nur Ikhwan
NIM. 50424010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Nur Ikhwan
NIM : 50424010
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		07/2026 /07
Pembimbing II	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I . NIP. 19850405 201903 1 007		06/2026 /07

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Syariah


Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 19850405 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ANALISIS KESELARASAN PROGRAM DISTRIBUSI KEKAYAAN PADA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN PEKALONGAN” yang disusun oleh:

Nama : M. Nur Ikhwan
NIM : 50424010
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		14/7/26
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		14/7/26
Penguji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. NIP. 19750211 199803 2 001		14/7/26
Penguji Anggota	Dr. Ahmad Rosyid, M.Si,Ak.CA NIP. 19790331 200604 1 003		14/7/2026

Mengetahui
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(') seperti شيء ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (') seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : الفُرُوضُويّ : ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyat : 19)

Bukanlah seorang mukmin (yang sejati) orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar: (HR. Al-Bukhari).

"Setiap kepemilikan harta menyimpan hak fakir miskin, dan kepedulian pada kaum yang membutuhkan adalah manifestasi keimanan sejati."

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT, Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutomo dan Ibu Nuryatin, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan, serta doa yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan dan proses pendidikan saya. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ketulusan doa dan restu yang selalu mengiringi perjalanan saya.
2. Istri tercinta, Nadiya Kamila, yang selalu hadir dalam setiap keadaan, menjadi tempat berbagi, menguatkan ketika langkah terasa berat, serta tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan keyakinan. Terima kasih telah menjadi pendukung terdepan, menemani setiap proses dengan kesabaran, serta menjadi alasan untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjuangan ini.
3. Para dosen pembimbing Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, koreksi, pengetahuan, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.

Setiap masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan penelitian ini.

4. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, berbagi pengalaman, serta saling memberikan semangat selama menempuh proses pendidikan.
5. Rekan-rekan Bapperida Kabupaten Pekalongan, khususnya Bidang Riset dan Inovasi Daerah, yang telah memberikan dukungan, pengertian, ruang belajar, serta arahan agar penelitian ini dapat disusun secara lebih terarah dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan masyarakat penerima manfaat di wilayah lokus kemiskinan ekstrem, yang tetap memberikan keterbukaan data dan pengetahuan di tengah berbagai keterbatasan, menjaga harapan, dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan.

Semoga tesis ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, ilmu, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan.

ABSTRAK

Ikhwan, M. N. (2026). *Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada Pemerintah Daerah Dan Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan*. Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing : (1) Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Kata kunci: distribusi kekayaan, kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah, organisasi pengelola zakat, keadilan distributif Islam

Kabupaten Pekalongan sebagai lokus prioritas nasional dalam pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan juga memiliki program kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak serta dapat menekan angka kemiskinan eskترم cukup signifikan pada tahun 2022-2025 yaitu dari 2,07% menjadi 0,27% .Namun penelitian sebelumnya mengungkap ketidaktepatan sasaran dan fragmentasi kajian antara program pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, orientasi, dan mekanisme pensasaran program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ, menilai keselarasan keduanya, serta menganalisis pola distribusi yang terjadi dengan keadilan distributif Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 16 informan dari unsur pemerintah daerah, BAZNAS, LAZISMU, LAZISNU, pemerintah desa, dan penerima manfaat, serta melalui observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, analisis dilakukan menggunakan model interaktif meliputi kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program Pemda dan OPZ masih berorientasi kuat pada perlindungan dasar melalui bantuan langsung, sementara pemberdayaan ekonomi tersedia namun cakupan dan pendampingannya belum merata. Keselarasan program berada pada tahap awal kesamaan tujuan dan komunikasi informal sudah terbentuk, tetapi pemadanan data, perencanaan teknis, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan bersama belum terwujud. Pola distribusi menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar sudah dilaksanakan namun jembatan menuju sumber penghasilan bermartabat belum terbentuk, sedangkan pemerataan distribusi belum tercapai akibat fragmentasi data dan koordinasi. Kontribusi penelitian ini adalah memperkaya studi implementasi kajian distribusi kekayaan Islam dengan kerangka keadilan distributif Chapra pada tingkat lokal, menyediakan kerangka analisis keselarasan program, serta memberikan rekomendasi kebijakan berupa penguatan jalur perlindungan ke pemberdayaan, pemadanan data, dan pelembagaan koordinasi melalui TKPK untuk mendekatkan sistem distribusi pada *falah* sebagai kesejahteraan holistik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

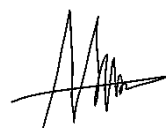
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Analisis Keselarasan Program Distribusi Kekayaan Pada Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan.”* Penyelesaian tesis ini merupakan karunia yang patut disyukuri, mengingat seluruh proses penelitian hingga penyempurnaan naskah tidak terlepas dari kemudahan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Keteladanan Rasulullah SAW. dalam menegakkan keadilan, kepedulian sosial, dan keberpihakan kepada kelompok yang lemah menjadi inspirasi penting dalam tesis ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini bukan semata-mata hasil usaha pribadi, melainkan juga berkat doa, dukungan, arahan, bantuan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, pemerintah daerah, Organisasi Pengelola Zakat, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.

Wassalamualaikum wr wb

Pekalongan, Juli 2026

Penulis,



M. Nur Ikhwani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Penelitian.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. <i>Grand Theory</i>	13
2.1.1. Definisi dan Landasan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam.....	13
2.1.2. Distribusi Kekayaan Islam dalam Perspektif Umer Chapra	18
2.2. <i>Middle Theory</i>	25
2.2.1. Orientasi Penyaluran dalam Distribusi Kekayaan Islam.....	25
2.2.2. Pensasaran dalam Distribusi Kekayaan Islam	28
2.2.3. Konsep Keselarasan dalam Keadilan Distributif Islam	28
2.3. Konsep Kemiskinan Ekstrem dan Program Distribusi Kekayaan	34
2.3.1. Konsep Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.....	34
2.3.2. Konsep Program Distribusi Kekayaan Pemerintah dan OPZ	36
2.4. Penelitian Terdahulu	38
2.5. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Desain Penelitian	49
3.2. Latar Penelitian	51
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	51

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	56
3.5. Teknik Keabsahan Data	58
3.6. Teknik Analisis Data	59
3.7. Teknik Penarikan Kesimpulan	61
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	63
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	63
4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	63
4.1.2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pekalongan.....	64
4.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pekalongan	69
4.2.1. Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.....	69
4.2.2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan	71
4.2.3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	73
4.3. Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Pekalongan	74
4.3.1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	74
4.3.2. NU-Care LAZISNU	77
4.3.3. LAZISMU	79
BAB V TEMUAN PENELITIAN	82
5.1. Bentuk Program Pemerintah Daerah dan OPZ dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	82
5.1.1. Program Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	83
5.1.2. Program Penyaluran Bantuan OPZ	86
5.1.3. Penerimaan dan Pelaksanaan Program di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem.....	91
5.2. Mekanisme Pensasaran, Validasi Data, dan Cakupan Penerima Manfaat.....	93
5.2.1. Basis Data dan Mekanisme Sasaran Penerima Manfaat	93
5.2.2. Perubahan Data dan Pemutakhiran Data Penerima Manfaat.....	96
5.2.3. Verifikasi Lapangan dan Cakupan Penerima Manfaat	100
5.3. Bentuk Koordinasi dan Keterlibatan Antar Lembaga dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	104
5.3.1. Posisi OPZ dalam Forum Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah.....	104

5.3.2. Praktik Rujukan dan Komunikasi Teknis lapangan	108
5.3.3. Pandangan Pemerintah daerah dan OPZ dalam Pensasaran Program	110
5.4. Dinamika Program dan Graduasi Penerima Manfaat di Desa Prioritas Kemiskinan Ekstrem	112
5.4.1. Profil Sosial-Ekonomi Desa Prioritas	112
5.4.2. Jenis Intervensi Program yang Diterima Desa	115
5.4.3. Proses Graduasi dan Penyesuaian Data di Tingkat Desa	118
BAB VI PEMBAHASAN	124
6.1. Orientasi Program, Struktur Distribusi, dan Mekanisme Pensasaran dalam Perspektif Distribusi Islam	124
6.1.1. Perlindungan Dasar dan Posisi Bantuan Langsung	124
6.1.2. Rintisan Pemberdayaan dan Kebutuhan Pendampingan Usaha	127
6.1.3. Mekanisme Pensasaran dan Interaksi Pemerintah Daerah dan OPZ	130
6.2. Keselarasan Program Pemerintah Daerah dan Organisasi Pengelola Zakat	134
6.2.1. Kesatuan Arah dan Filosofi	134
6.2.2. Keterpaduan Data dan Sasaran	136
6.2.3. Koordinasi Proses dan Pembagian Peran	138
6.2.4. Kesamaan Ukuran Keberhasilan	141
6.2.5. Posisi Keselarasan Program Pemerintah Daerah dan OPZ	143
6.3. Kesesuaian Program Pemerintah Daerah dan OPZ dengan Keadilan distributif Islam Umer Chapra	145
6.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Kerangka <i>Need Fulfillment</i>	146
6.3.2. Penciptaan Sumber Penghasilan Bermartabat dalam Kerangka <i>Respectable source of earnings</i>	149
6.3.3. Pemerataan Distribusi dalam Kerangka <i>Equitable distribution of wealth</i>	153
6.3.4. Potret Kesesuaian Sistem Distribusi di Kabupaten Pekalongan	156
6.4. Arah Penguatan Program Pendistribusian Kekayaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pekalongan	160
6.4.1. Memperkuat Jalur dari Perlindungan ke Pemberdayaan	162
6.4.2. Memadankan Data dan Koordinasi Antar Lembaga	164

6.4.3. Melibatkan Warga Miskin dalam Perencanaan dan Evaluasi.....	166
6.4.4. Keterkaitan Antar Pilar dan Peran Aktor.....	167
6.4.5. Falah sebagai Tujuan Keadilan Distributif dalam Arah Penguatan	170
6.4.6. Keterbatasan Penelitian.....	173
BAB VII PENUTUP	176
7.1. Simpulan	176
7.2. Implikasi Teoretis dan Praktis.....	178
7.2.1. Implikasi Teoritis	178
7.2.2. Implikasi Praktis	179
7.3. Saran	180
7.3.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.....	180
7.3.2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat	181
7.3.3. Bagi Penelitian Selanjutnya	182
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN.....	189



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Angka Kemiskinan Kabupaten Pekalongan	4
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian	46
Gambar 3.1. Tahapan Analisis Data	59
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	63
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021-2025.....	68
Gambar 6.4 Konsep Arah Penguatan Program Pendistribusian Kekayaan.....	168



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan/Akronim	Kepanjangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bapperida	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BLK	Balai Latihan Kerja
BOP	Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPNT	Bantuan Pangan Non-Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
CMI	<i>Critical Minimum Income</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dikbud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinkes	Dinas Kesehatan
Dinkop UKM Naker	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
Dinsos	Dinas Sosial
DKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTSEN	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KemenPAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KOIN NU	Kotak Infak Nahdlatul Ulama
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LAZISMU	Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah
LAZISNU	Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama
LP2KD	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MWCNU	Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama
NIB	Nomor Induk Berusaha
NU	Nahdlatul Ulama
OKI	Organisasi Kerja Sama Islam
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OPPKPKE	Optimalisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
OPZ	Organisasi Pengelola Zakat
P3KE	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PCNU	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDM	Pimpinan Daerah Muhammadiyah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Pemsosbud	Pemerintahan dan Sosial Budaya
Dinas Perkim LH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga
PKH	Program Keluarga Harapan
PPA	<i>Participatory Poverty Assessment</i>
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

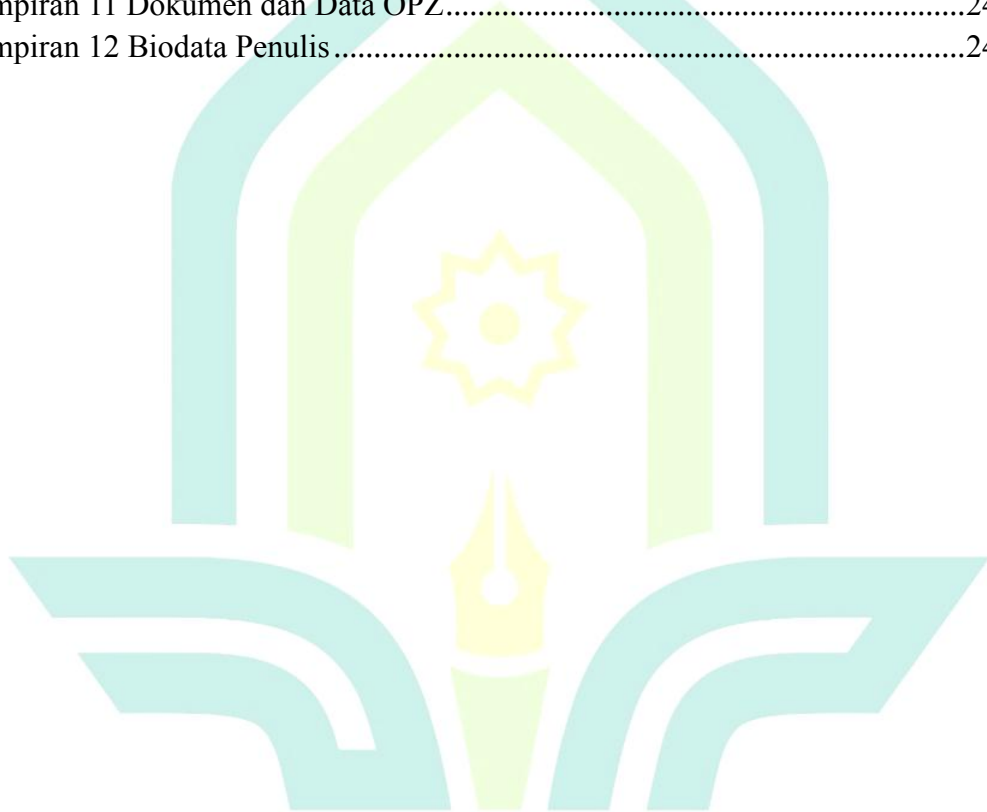
RATPKD	Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTLH	Rumah Tidak Layak Huni
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation
SK	Surat Keputusan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPZ	Unit Pengumpul Zakat
UPZIS	Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah
ZIS	Zakat, Infak, dan Sedekah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tahap Keselarasan	33
Tabel 2.2. <i>Research Gap</i> Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara	52
Tabel 3.2 Daftar Dokumen Lembaga	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin.....	65
Tabel 4.2 Struktur Ketenagakerjaan Berdasarkan Angkatan Kerja.....	67
Tabel 4.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pekalongan.....	70
Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Strategi Utama Tahun 2025.....	82
Tabel 5.2 Orientasi Program OPZ Kabupaten Pekalongan Tahun 2025	83
Tabel 5.3 Perbandingan Mekanisme Pensasaran Pemerintah Daerah dan OPZ ...	87
Tabel 5.4 Profil Sosial-Ekonomi Desa Sampel Lokus Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	94
Tabel 5.5 Ringkasan Intervensi Program pada Tiga Desa Sampel.....	113
Tabel 5.6 Data Graduasi Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	116
Tabel 6.1 Kesenjangan antara Model Pemberdayaan dan Implementasi di Lapangan.....	119
Tabel 6.2 Perbandingan Karakteristik Data Pensasaran Pemerintah Daerah dan OPZ	128
Tabel 6.3 Posisi Keselarasan Program Berdasarkan Empat Indikator	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	189
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Bapperida Kabupaten Pekalongan.....	190
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Dinas Sosial	205
Lampiran 4 Transkrip Wawancara BAZNAS	212
Lampiran 5 Transkrip Wawancara LAZISNU	216
Lampiran 6 Transkrip Wawancara LAZISMU.....	218
Lampiran 7 Transkrip Wawancara TKSK Kecamatan	221
Lampiran 8 Transkrip Wawancara Perangkat Desa	230
Lampiran 9 Transkrip Wawancara Penerima Manfaat.....	233
Lampiran 10 Dokumen dan Data Pemerintah Daerah	236
Lampiran 11 Dokumen dan Data OPZ.....	241
Lampiran 12 Biodata Penulis.....	246



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia yang masih belum dapat dituntaskan. Berdasarkan data terkini 23,85 juta penduduk atau 8,47 persen hidup di bawah garis kemiskinan, dan 0,85 persen atau 2,38 juta orang dalam keadaan miskin ekstrem (Badan Pusat Statistik, 2025). Pemerintah merespons melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dengan penyempurnaan data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) (Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, 2025).

Kebijakan ini dirumuskan melalui tiga pilar yaitu : 1) menurunkan beban pengeluaran; 2) meningkatkan pendapatan dan 3) mengonvergensi program lintas sektor (Bappenas, 2025). Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan capaian positif, meski akurasi penyaluran belum optimal akibat tumpang tindih data dan lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan (Husna et al., 2025 Pertiwi et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang luas untuk melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem nasional termasuk dalam hal ini pada filantropi Islam.

Indonesia memiliki potensi filantropi Islam yang besar sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim. Data BAZNAS (2026) mencatat potensi zakat mencapai Rp327 triliun, meski baru terealisasi Rp40 triliun. Pada tahun 2022, BAZNAS melaporkan keberhasilan mengentaskan 51,76 persen mustahik atau 42.279 jiwa, dengan separuhnya dalam kondisi miskin ekstrem (Puskas Baznas, 2024). Disatu sisi ZIS yang disalurkan secara produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Mokodenseho et al., 2024 Pratama & Zubaidah, 2023).

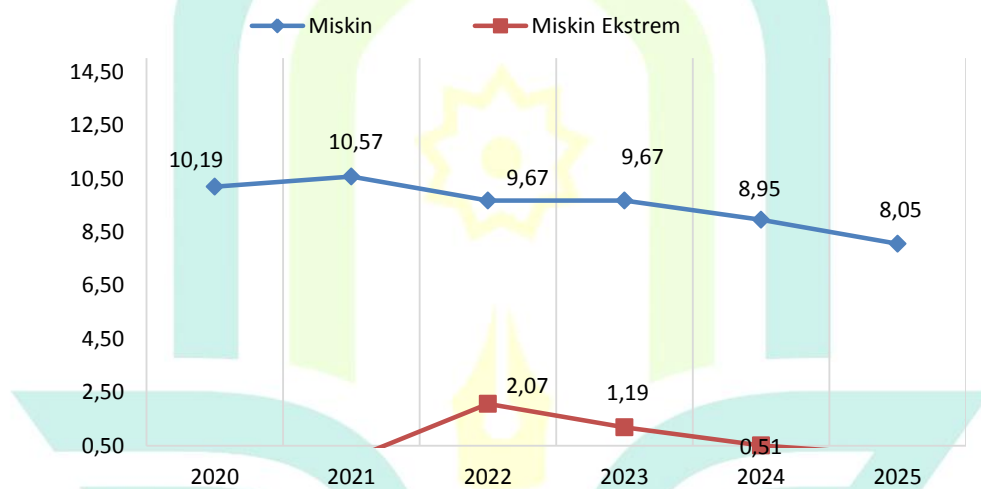
Potensi filantropi Islam dalam hal ini ZIS sangat besar sehingga menggerakkan pemerintah untuk menerbitkan regulasi kolaborasi multipihak yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem (Presiden Republik Indonesia, 2022). Menurut Gallien et al., (2024) zakat menjadi instrumen penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan pada negara mayoritas muslim dunia yang tergabung dalam OKI melalui redistribusi non-negara dan kekuatan solidaritas masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Effendi et al., (2025) di Indonesia yang menemukan bahwa program jaminan sosial pemerintah seperti PKH dan BPNT meskipun berdampak positif namun seringkali menghadapi masalah keterbatasan distribusi maupun ketepatan penerima. Sehingga sinergi jaminan sosial pemerintah dengan ZIS sangat

penting untuk meningkatkan program pengentasan kemiskinan nasional berbasis solidaritas.

Dalam keadilan distribusi Islam Chapra (1992) menekankan bahwa kemiskinan merupakan implikasi distribusi yang tidak merata, sehingga kesejahteraan hanya tercapai ketika pemenuhan kebutuhan dasar, akses penghasilan layak, dan keadilan distributif terwujud. Hal ini diperkuat temuan Lekahena et al., (2025) bahwa determinan utama kemiskinan nasional adalah ketimpangan antarwilayah Instrumen sosial Islam dan belanja sosial negara bersifat komplementer, bukan alternatif (Chapra, 1992). Pemerintah melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur optimalisasi sinergi multi-sektor dan multi-instrumen termasuk ZIS.

Namun studi literatur terkait ditemukan masih memisahkan kedua instrumen ini dalam risetnya. Misalnya, studi efektivitas program pemerintah yang dilakukan oleh Pertiwi et al., (2025) dan Ramdani (2024) hanya fokus pada bansos, sementara penelitian tentang instrumen Islam Beik et al., (2025) dan Herianingrum (2024) menggunakan pendekatan komparatif terpisah dan belum mengungkap interaksi empiris keduanya di lapangan. Padahal secara regulasi, instrumen belanja sosial pemerintah dan ZIS memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen distribusi kekayaan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang proses distribusi empiris belanja sosial negara dan instrumen sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Kabupaten Pekalongan ditetapkan sebagai lokus prioritas nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) (TNP2K, 2022). Pemerintah daerah merespons dengan menerapkan metode kolaboratif lintas sektor, termasuk bersama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang disebut laboratorium kemiskinan (Wismaningsih et al., 2021). Hasilnya, angka kemiskinan turun dari 9,67 persen pada 2022 menjadi 8,05 persen pada 2025, sementara kemiskinan ekstrem menurun signifikan dari 2,07 persen menjadi 0,27 persen (Badan Pusat Statistik, 2026). Capaian ini bersamaan implementasi pendekatan kolaboratif dalam penekanan kemiskinan ekstrem.



Gambar 1.1.
Angka Kemiskinan Kabupaten Pekalongan
BPS Kabupaten Pekalongan, 2026

Pada saat yang sama, potensi zakat di wilayah ini juga cukup besar. LAZISMU Kabupaten Pekalongan berhasil menghimpun dana sekitar Rp8 miliar pada tahun 2022 yang disalurkan melalui program pemberdayaan UMKM, petani bangkit, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan (B. Effendi & Nariah, 2023). BAZNAS Kabupaten Pekalongan mencatat

penghimpunan dana ZIS mencapai Rp6,2 miliar pada tahun 2023 (Jannah, 2023), sementara LAZISNU menunjukkan model pemberdayaan berbasis kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan perempuan (Mufid & Elizabeth, 2025). Hal ini menunjukkan dari sisi OPZ juga aktif dalam distribusi untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

Kabupaten Pekalongan melalui Inovasi Laboratorium Kemiskinan menerapkan pendekatan kolaborasi *pentahelix* yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi pengelola zakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha telah diakui secara nasional sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dan menjadi percontohan dan direplikasi oleh beberapa daerah lain (Wismaningsih, Purnaweni, & Priyadi, 2021). Di balik potensi dan capaian tersebut, sejumlah riset yang berfokus di Kabupaten Pekalongan mengungkapkan persoalan dalam implementasi program. Aini, (2023) menemukan bahwa program Laboratorium Kemiskinan di Desa Kertijayan masih mengalami ketidaktepatan sasaran, di mana banyak masyarakat miskin tidak diikutsertakan sehingga program harus diulang pada tahun berikutnya. Penelitian Ulil Albab (2024) juga mengidentifikasi bahwa pelatihan di Balai Latihan Kerja hanya terpusat di satu desa dan tidak menjangkau seluruh lokasi prioritas kemiskinan ekstrem. Di sisi OPZ, Maroh (2019) mengidentifikasi hambatan pendistribusian dana zakat di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis, dan keterbatasan dana dan personil.

Berbagai kajian tentang program pemerintah dan OPZ di atas selama ini masih berjalan terfragmentasi dan belum ada yang memetakan secara sistematis keterkaitan program antar kedua kanal tersebut. Padahal, ketidakhadiran pemetaan tentang keselarasan program berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran, duplikasi bantuan pada penerima yang sama, serta kesenjangan layanan pada kelompok miskin ekstrem yang tidak terjangkau kedua institusi. Oleh karena itu, penelitian tentang keselarasan program distribusi kekayaan antara pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat menjadi sangat diperlukan untuk memastikan intervensi yang lebih optimal dan tepat sasaran dengan dapat saling melengkapi antara pemerintah daerah dan OPZ dan berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

1.2. Identifikasi Masalah

Kabupaten Pekalongan masih memiliki masalah kemiskinan ekstrem yang belum dituntaskan meskipun telah menyusun program penanggulangan kemiskinan ekstrem secara kolaboratif melibatkan pemerintah daerah dan OPZ yang selaras dengan kebijakan nasional yaitu menguatkan kerjasama multipihak. Namun demikian, masih terdapat masalah ketidaktepatan sasaran dan keterbatasan dalam pelaksanaan distribusi oleh pemerintah daerah maupun OPZ. Ketidakhadiran pemetaan tentang keselarasan program berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran, duplikasi bantuan pada penerima yang sama, serta kesenjangan layanan pada kelompok miskin ekstrem yang tidak terjangkau kedua institusi. Oleh karena itu, penting

untuk mengidentifikasi sejauh mana program distribusi yang berjalan selaras dengan keadilan distributif Islam meliputi : pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses penghidupan layak, dan pemerataan distribusi kekayaan yang berkeadilan .

1.3. Batasan Penelitian

Agar penelitian tetap terarah pada tujuan analisis keselarasan program, ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Organisasi Pengelola zakat (OPZ) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi OPZ dari pemerintah yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan dan OPZ dari masyarakat yaitu LAZISNU dan LAZISMU aktif di Kabupaten Pekalongan.
2. Fokus pada program distribusi yang mencakup perencanaan program, mekanisme pensasaran penerima manfaat, bentuk intervensi dan evaluasi program dari pemerintah daerah dan OPZ.
3. Analisis pada program di tingkat operasional bukan pada tata kola internal dan struktur kelembagaan. Fokus utama adalah orientasi, pensasaran program, serta keterkaitan antar program Pemerintah daerah dan OPZ, bukan evaluasi terhadap struktur organisasi atau tata kelola internal lembaga.
4. Identifikasi keselarasan antar program yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ , tanpa mengukur tingkat efektivitas dan dampak dari masing-masing program terhadap penerima manfaat secara langsung.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur, orientasi dan pensasaran program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana keselarasan program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan?
3. Mengapa program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan menghasilkan pola distribusi tertentu dari perspektif keadilan distributif menurut Islam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis struktur, orientasi dan pensasaran program distribusi kekayaan pada pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis keselarasan program distribusi kekayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan.

3. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pola distribusi kekayaan Pemda dan OPZ dalam perspektif keadilan distributif menurut Islam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, akses penghidupan layak, dan pemerataan distribusi kekayaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoretis dan praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini memperkaya studi ekonomi Islam tentang pengentasan kemiskinan dalam perpektif distribusi kekayaan yang lakukan oleh OPZ dan pemerintah daerah dalam kerangka tujuan ekonomi Islam dalam keadilan distributif Islam berdasarkan data temuan empiris di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian memiliki manfaat praktis bagi:

a. Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Memberikan gambaran proses operasional pendistribusian program serta rekomendasi mengenai pentingnya keselasan program dengan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem,

b. Organisais Pengelola Zakat (OPZ)

Memberikan gambaran pemetaan evaluasi dan evaluasi program bagi OPZ serta untuk dasar penguatan sinergi kelembagaan, .

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam struktur berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, rumusan pertanyaan utama, tujuan spesifik, batasan ruang lingkup, beserta manfaat praktis maupun teoretis untuk memberikan konteks permasalahan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Pembatasan Masalah
- 1.4. Rumusan Masalah
- 1.5. Tujuan Penelitian
- 1.6. Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan definisi konsep utama, meninjau literatur terdahulu yang relevan, menjelaskan kerangka berpikir, guna membangun dasar argumentasi ilmiah dalam menjawab rumusan masalah penelitian

- 2.1. *Grand Theory*
- 2.2. *Middle Theory*
- 2.3. Konsep Kemiskinan dan Program Distribusi
- 2.4. Penelitian Terdahulu
- 2.5. Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan penerapan desain kualitatif secara teknis. Prosesnya mencakup strategi penentuan informan bersama prosedur pengumpulan data hingga tahapan analisis tematik.

- 3.1. Desain Penelitian
- 3.2. Latar Penelitian
- 3.3. Jenis dan Sumber Data
- 3.4. Teknik Pengumpulan Data
- 3.5. Teknik Keabsahan Data
- 3.6. Teknik Analisis Data
- 3.7. Teknik Simpulan Data

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi profil umum wilayah, data kemiskinan daerah, kebijakan strategis serta tim koordinasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

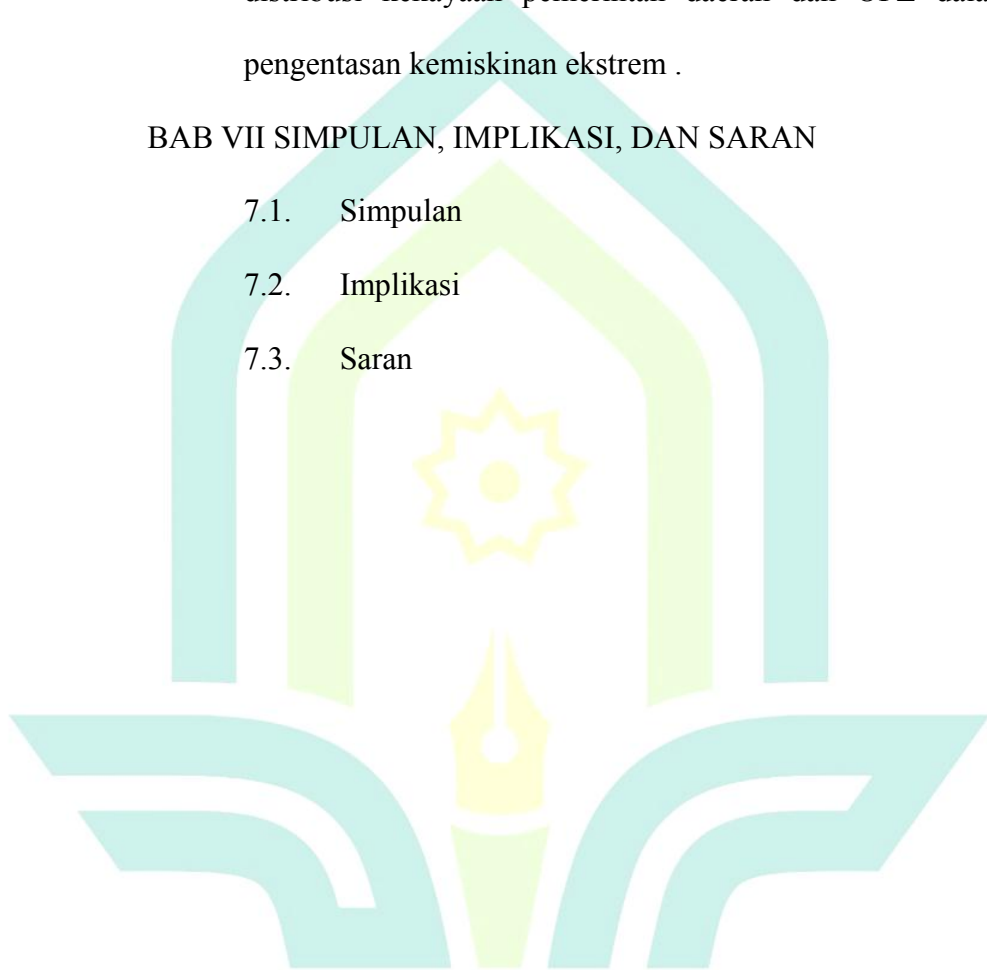
Bab ini menyajikan hasil temuan dari yang diperoleh dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem pada lokasi penelitian.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis hasil temuan dari perspektif teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan dilakukan dengan menarik benang merah antara data empiris dan teori untuk mendapat gambaran utuh dinamika program distribusi kekayaan pemerintah daerah dan OPZ dalam pengentasan kemiskinan ekstrem .

BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

- 7.1. Simpulan
- 7.2. Implikasi
- 7.3. Saran



BAB VII

PENUTUP

7.1. Simpulan

Penelitian ini menganalisis struktur, orientasi, dan keselarasan program pendistribusian kekayaan yang dijalankan Pemerintah daerah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis pola distribusi dari perspektif Keadilan distributif menurut Islam yang dirumuskan Umer Chapra (1992) maka diperoleh tiga simpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melaksanakan program berdasarkan regulasi dari pusat maupun daerah melalui berbagai perangkat daerah, sedangkan OPZ menjalankan distribusi melalui BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU. Kedua jalur masih berorientasi kuat pada perlindungan dasar melalui bantuan langsung, sementara program pemberdayaan ekonomi telah tersedia tetapi cakupan dan pendampingannya masih terbatas. Dalam pensasaran, pemerintah daerah menggunakan data administratif dan kategori desil kesejahteraan, sedangkan OPZ menggunakan kriteria asnaf, proposal, jaringan organisasi, dan verifikasi lapangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua jalur memiliki dasar pensasaran yang berbeda, tetapi berpotensi saling melengkapi.

2. Keselarasan program pemerintah daerah dan OPZ berada pada tahap awal. Kesamaan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan mendorong kemandirian telah terbentuk, demikian pula komunikasi dan praktik rujukan pada tingkat pelaksana. Namun, keselarasan tersebut belum berkembang menjadi pemadanan data, perencanaan teknis, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan bersama. Forum koordinasi masih lebih banyak berfungsi sebagai ruang penyampaian informasi dan evaluasi, sedangkan pelaksanaan program tetap mengikuti mekanisme masing-masing lembaga. Koordinasi operasional juga lebih terlihat antara pemerintah daerah dan BAZNAS dibandingkan dengan LAZISMU dan LAZISNU.
3. Dalam kerangka keadilan distributif Islam menurut Umer Chapra, pola distribusi yang dihasilkan menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar (*Need Fulfillment*) telah berjalan kuat namun belum terhubung dengan jalur kemandirian; sumber penghasilan bermartabat (*Respectable Source of Earnings*) mulai diarahkan melalui program pemberdayaan namun pendampingan terbatas masih menjadi kendala dan pemerataan distribusi (*Equitable Distribution of Wealth*) belum terwujud akibat fragmentasi data, verifikasi yang berjalan sendiri-sendiri, dan koordinasi yang belum melembaga. Pola ini berakar pada lemahnya internalisasi nilai dalam tataran kelembagaan dimana *tauhid* yang menuntut pengelolaan sumber daya sebagai amanah kolektif, *khilafah* yang menuntut produktivitas dan tanggung jawab sosial, serta *'adalah*

yang menuntut keadilan distributif. Akibatnya, malah sebagai kesejahteraan holistik yang mencakup kecukupan materi, kemandirian, keadilan, dan martabat belum dapat diwujudkan karena ketiga tujuan keadilan distributif Islam belum terintegrasi secara sistemik.

Dari tiga simpulan di atas menunjukkan bahwa program distribusi kekayaan di Kabupaten Pekalongan telah memiliki unsur perlindungan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan sasaran. Namun, ketiga unsur tersebut belum terhubung secara utuh. Kelemahan utama terletak pada belum jelasnya jalur peralihan dari bantuan menuju pemberdayaan, belum terpadunya data penerima, serta belum terbentuknya perencanaan dan evaluasi formal bersama antara pemerintah daerah dan OPZ.

7.2. Implikasi Teoretis dan Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis.

7.2.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi kekayaan Umer Chapra relevan untuk analisis pendistribusian bantuan sosial pemerintah daerah sebagai bentuk peran negara dan distribusi ZIS sebagai instrumen sosial islam pada tingkat lokal. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan kebutuhan dasar, sumber penghasilan bermartabat, dan pemerataan distribusi merupakan tujuan yang saling terkait dan tidak seharusnya dipahami sebagai tahapan yang berdiri sendiri. Kuatnya pemenuhan kebutuhan dasar belum dengan sendirinya menghasilkan

kemandirian apabila penerima tidak memiliki akses menuju program pemberdayaan. Demikian pula, keberadaan program perlindungan dan pemberdayaan belum menjamin pemerataan apabila data penerima dan koordinasi antarlembaga masih terpisah.

Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan Chapra (1992) bahwa peran negara dan filantropi Islam dalam distribusi kekayaan bersifat dapat saling melengkapi. Pemerintah daerah memiliki kekuatan dalam cakupan program, kewenangan kebijakan, dan pengelolaan data administratif. OPZ memiliki fleksibilitas penyaluran, kedekatan dengan komunitas, dan kemampuan merespons kebutuhan tertentu secara lebih cepat. Hal ini dapat terwujud jika keselarasan bukan hanya pada tataran tujuan saja namun diwujudkan dalam kerangka operasional yang solid antara pemerintah daerah dan OPZ di Kabupaten Pekalongan.

7.2.2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan penguatan penyaluran bantuan sosial dan ZIS tidak cukup dilakukan melalui penambahan program atau anggaran. Persoalan yang lebih mendasar terdapat pada keterhubungan data, koordinasi antarlembaga, mekanisme rujukan, dan pendampingan penerima. Pemerintah daerah memiliki kekuatan pada cakupan, data, dan perlindungan sosial, sedangkan OPZ memiliki kekuatan pada fleksibilitas, kedekatan komunitas, dan respons terhadap kebutuhan lapangan. Karena itu, dalam pengentasan

kemiskinan ekstrem pemerintah daerah dan OPZ memiliki potensi kuat untuk saling melengkapi.

7.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian, saran yang diajukan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Organisasi Pengelola Zakat dan Peneliti selanjutnya.

7.2.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Adapun saran bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui TKPK perlu mengembangkan forum koordinasi yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang evaluasi, tetapi juga digunakan untuk menyusun rencana teknis bersama, memetakan sasaran, membagi peran, dan menindaklanjuti hasil program.
2. TKPK perlu memfasilitasi pemadanan data penerima antara perangkat daerah dan OPZ secara berkala. Pemadanan dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan lembaga, kriteria asnaf, dan perlindungan data pribadi penerima manfaat.
3. Pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme rujukan yang menghubungkan perangkat daerah, TKSK, pemerintah desa, dan OPZ. Mekanisme tersebut dapat memuat jenis kebutuhan yang dapat dirujuk, lembaga tujuan, dokumen yang diperlukan, serta pencatatan tindak lanjut.
4. Program bantuan langsung perlu dihubungkan secara lebih jelas dengan program peningkatan pendapatan. Penerima yang kondisi

dasarnya telah relatif stabil dapat diarahkan menuju pelatihan, bantuan alat produksi, akses kerja, atau program usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

5. Praktik PPA dapat diperluas secara bertahap pada desa prioritas. Hasilnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan data, penentuan kebutuhan, dan evaluasi program.

7.2.2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Adapun saran bagi Organisasi Pengelola Zakat , sebagai berikut :

1. BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU perlu menyusun ringkasan data penerima dan program dalam format yang memungkinkan pertukaran informasi dengan pemerintah daerah tanpa mengabaikan ketentuan syariah dan kerahasiaan data.
2. OPZ perlu memperkuat pendampingan pada program pemberdayaan. Penyaluran modal atau peralatan usaha sebaiknya diikuti dengan penilaian kesiapan penerima, pendampingan teknis, pencatatan perkembangan usaha, dan evaluasi berkala.
3. OPZ perlu mengembangkan indikator keberhasilan yang tidak hanya didasarkan pada jumlah penerima atau dana yang disalurkan, tetapi juga pada keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan, penguatan aset produktif, dan perkembangan kemandirian mustahik.
4. LAZISMU dan LAZISNU perlu meningkatkan komunikasi program dengan pemerintah daerah, TKSK, dan pemerintah desa agar

kontribusi jaringan komunitasnya dapat lebih terbaca dalam pemetaan program tanpa kehilangan kemandirian kelembagaan.

5. OPZ dapat memperkuat pembagian wilayah atau jenis program berdasarkan keunggulan masing-masing lembaga. Langkah tersebut diperlukan agar program tidak terkonsentrasi pada penerima atau wilayah tertentu dan dapat menjangkau kelompok yang belum memperoleh bantuan.

7.2.3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adapun saran bagi Penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan penerima manfaat yang lebih beragam dari beberapa desa dan jenis program agar pengalaman penerima dapat dianalisis secara lebih luas.
2. Pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat digunakan untuk mengukur perubahan pendapatan, aset produktif, konsumsi rumah tangga, keberlanjutan usaha, serta perubahan status kemiskinan setelah menerima program.
3. Penelitian lebih mendalam diperlukan untuk menilai proses graduasi dan keberlanjutan program pemberdayaan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
4. Penelitian komparatif antar daerah dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana variasi hubungan antara pemerintah daerah dan OPZ memengaruhi keterpaduan data, pembagian peran, dan pemerataan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TERJEMAHNYA

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI. <https://quran.kemenag.go.id/>

B. BUKU (MONOGRAF & TEXTBOOK)

Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah* (Vols. 1–2). Dar al-Taqwa.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation; Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought. <http://archive.org/details/islameconomiccha0000chap>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

Kahf, M. (1993). *Practices of Zakat Management in Four Muslim Countries: Pakistan, Kuwait, Jordan, and Egypt*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB).

Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Rajawali Pers.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.

Sadeq, A. M. (1996). *Ethico-Economic Institution of Zakah: An Instrument of Self-Reliance and Sustainable Development*. IIUM Research Centre.

Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* (Vol. 1). Printed for W. Strahan and T. Cadell in the Strand, London. (Original work published 1776)

Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

C. ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Adriani, S. K., & Arifin, S. (2025). The Role of Income Distribution through ZIS in Realising Economic Justice in Indonesia. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 16(1), 189–197. <https://doi.org/10.62730/syaikhuna.v16i01.7704>

Beik, I. S., Irfany, M. I., & Herlin. (2025). Peran belanja sosial dan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. *IPB University*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162439>

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2).

Effendi, J., Qoyum, A., Hasanah, I., Munawaroh, U., Thaker, H. M. T., & Hosen, M. (2025). Social Securities Scheme, Financial Inclusion, And Its Impact On Poverty Alleviation In Indonesia: Case Of Zakat Recipient. *International Journal of Business and Society*, 26(2), 690–703. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8887.2025>

Gallien, M., Javed, U., & Van Den Boogaard, V. (2024). Zakat, Non-state Welfare Provision and Redistribution in Times of Crisis: Evidence from the Covid-19 Pandemic. *Studies in Comparative International Development*, 61(1), 34–60. <https://doi.org/10.1007/s12116-024-09447-x>

Herianingrum, S. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>

- Hidayat, R., Ibrahim, F. S., & Mardawati. (2025). Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1). <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/5>
- Husna, M., Ningsih, R., Zulkarnain, M., & Handayani, W. T. (2025). Implementasi Model CIBEST dalam Mengukur Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kamang Magek. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/krigan/article/view/9462>
- Irfan, M. A. (2024). Strategi Sinergi Pendanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Cilegon. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 12(2), 174–186.
- Kamarni, N., Utami, Y., & Hasib, F. F. (2024). The Role of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS), HDI, and Government Expenditure on Poverty Alleviation: Economic Growth as an Intervening Variable. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v7i1.236>
- Khoiri, A. (2024). Management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) Funds in Driving Poverty Alleviation to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of BAZNAS Kediri City. *Journal of Development Research*, 8(2). <https://doi.org/10.28926/jdr.v8i2.395>
- Lailia, K., & Waluyo, A. (2026). Antara Kritik Kapitalisme dan Sosialisme Menuju Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan: Telaah Pemikiran Ekonomi Muhammad Umer Chapra. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(2), 820–833. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i2.10541>
- Mokodenseho, S., Paputungan, P., Paputungan, A., Modeong, N., Manggo, T., Kobandaha, S., Dilapanga, S., & Imban, Y. (2024). The Strategic Role of Zakat Management in Socio-Economic Empowerment of the Ummah. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 114–120. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.821>
- Mu'arif, S., & Nurrahman, D. (2024). Synergistic of District National Zakat Amil Agency, Zakat Amil Institution and Pati Regional Government in Zakat Management. *International Journal of Science, Technology and Management*, 5(5).
- Mufid, M., & Elizabeth, M. Z. (2025). Entrepreneurial leadership and organizational resilience in Islamic philanthropy: A case study of LAZISNU Doro, Indonesia. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1).

- Pertiwi, C., Oktarina, A., Suprianto, Y., & Widjajawati, E. (2025). The effectiveness of social assistance distribution policy for extreme poverty eradication in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 40(3), 343–362. <https://doi.org/10.22146/jieb.v40i3.10051>
- Pratama, M. Y. J., & Zubaidah, S. (2023). Poverty Alleviation Policy Strategy Through Sustainability Development Goals (SDGs) and Indonesia's Economic Resources. *Government & Resilience*, 1(1), 66–79. <https://doi.org/10.62503/gr.v1i1.6>
- Putri Handayani, N., Addiarrahman, & Hilmi. (2024). Implementation of Zakat Distribution by BAZNAS of Jambi City. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(1), 99–114. <https://doi.org/10.18326/infs13.v18i1.99-114>
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak belanja subsidi dan bantuan sosial dari APBD terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 57–77.
- Sari, T. N., Fitriani, F., & Nurherlina, N. (2025). Determinants of Poverty Reduction in Indonesia: Evidence from Islamic Social Finance, Islamic Microfinance Institutions, and Government Interventions. *Review of Islamic Economics and Finance*, 8(1).
- Streeten, P. (1984). Basic needs: Some unsettled questions. *World Development*, 12(9), 973–978. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(84\)90054-8](https://doi.org/10.1016/0305-750X(84)90054-8)
- Wahyudi, I., Mahroji, M., & Angelita, J. (2024). Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah. *SENTRALISASI*, 13(1), 182–198. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2986>
- Wismaningsih, K., Astuti, R. S., Dwimawanti, I. H., Puspo, B., & Afrizal, T. (2021). Best Practice Inovasi Pelayanan Publik "Laboratorium Kemiskinan" Di Kabupaten Pekalongan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 256–263. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.24882>

D. TESIS DAN SKRIPSI

- Adriana. (2025). *Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan* [Skripsi S1]. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Aini, Y. Y. (2023). *Efektivitas implementasi program laboratorium kemiskinan berbasis gender di Desa Kertijayan, Kabupaten Pekalongan* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.

- Jannah, Z. (2023). *Strategi penyaluran dana ZIS BAZNAS melalui Kabupaten Pekalongan melalui program bantuan pendidikan* [Skripsi]. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Maroh, N. S. (2019). *Pendistribusian dana zakat profesi PNS (Studi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan)* [Skripsi]. IAIN Pekalongan.
- Ulil Albab. (2024). *Terwujudnya nilai-nilai maqashid syariah dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan* [Tesis S2]. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. PUBLIKASI RESMI

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2025* (Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXVIII). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka Tahun 2026* (p. 441). Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2025). *Panduan umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem*. Kementerian PPN/Bappenas.
- BAZNAS. (2026). *Outlook Zakat Indonesia 2026* (p. 140). Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. (2025). *Laporan capaian penanggulangan kemiskinan tahun 2025: Transisi dari bantuan sosial menuju pemberdayaan*. Kemenko PM.
- Puskas Baznas. (2024). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023* (pp. 1–24). Badan Amil Zakat Nasional.
- TNP2K. (2022). *Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)*. TNP2K.
- United Nations. (1996). *Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen, 6-12 March 1995*. United Nations. <https://preview.catalog.hathitrust.org/Record/102570073>

F. PROSIDING / SEMINAR

- Lekahena, C. D., Pasaribu, L. L. S. T., & Franty, Y. K. (2025). Penentuan Model Regresi Linier Berganda Dalam Menganalisis Faktor Sosial-Ekonomi Penyebab Kemiskinan. *Prosiding Seminar Nasional Statistika Aktuaria*. <https://prosidingnsa.statistics.unpad.ac.id/?journal=prosidingnsa&page=article&op=view&path%5B%5D=428>

G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (2025). <https://peraturan.go.id>

Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011).

H. KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Edisi Kedua)*. Surabaya: Pustaka Progresif.

